LIBERALISASI PENDIDIKAN: Sebuah Wacana Kontroversial

Oleh

Dr. M. Tajudin Nur, M.Si¹

ABSTRAK Liberalisasi pendidikan telah menjadi perdebatan hangat sejumlah kalangan, padahal jika dimaknai secara benar, liberalisasi sesungguhnya diperlukan untuk memberikan keleluasaan bagi penyelenggara pendidikan dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi, seperti yang dikemas dengan otonomi pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Dalam konteks ini, yang sesungguhnya diperlukan adalah adanya peraturan yang tetap menjamin akses pendidikan bagi semua warga negara, terproteksinya nilai-nilai luhur bangsa, dan tetap eksisnya perguruan lokal (termasuk swasta) di tengah persaingan internal maupun kompetisi global yang semakin sulit terbendung.

Kata Kunci: *liberalisasi pendidikan, modal asing, BHP (Badan Hukum Pendidikan)*

PENDAHULUAN

BHP atau Badan Hukum Pendidikan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 telah menimbulkan polemik berkepanjangan. Bahkan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) sempat menggelar seminar merespon undang-undang tersebut dengan mengetengahkan tajuk “**Runtuhnya Perguruan Swasta di Era Liberakisasi Pendidikan**” di sebuah hotel mewah, tepatnya Hotel Borobudur Jakarta tanggal 16 Februari 2009. Dalam seminar tersebut terdapat tiga kecenderungan yang muncul, yaitu

---

¹ Dosen Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Tanjungpura sejak 1986, dan mengampu a.l. matakuliah Pengantar Pendidikan

menerima dengan berbagai catatan, menolak, dan tidak berpendapat secara tegas.

Respon Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menanggapi implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanahkan keharusan adanya pengaturan tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) sudah muncul pula ketika Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang BHP masih berwujud Rancangan Undang-Undang (RUU), misalnya menggelar seminar bertajuk **“RUU BHP dan Liberalisasi Pendidikan Isyaratkan Lonceng Kematian”** di Hotel The Sultan Jakarta tanggal 30 Agustus 2007. Dalam berbagai kesempatan yang telah disebutkan maupun kesempatan lainnya, kecenderungan menolak UU BHP sangat kuat di kalangan badan penyelenggara pendidikan swasta (yayasan, perkumpulan, dan bentuk-bentuk penyelenggaraan lainnya). Salah satu alasannya adalah karena undang-undang tersebut sarat dengan pesan liberalisasi di bidang pendidikan, di samping terdapat alasan-alasan lainnya.

Mahasiswa, terutama yang berasal dari perguruan tinggi negeri (PTN) juga melakukan penolakan keberadaan BHP yang ditetapkan dengan undang-undang tersebut di atas, meskipun alasan utamanya adalah karena kekhawatiran membengkaknya biaya kuliah, yang berdampak pada sempitnya akses masuk ke perguruan tinggi (terutama PTN) bagi kalangan masyarakat yang kurang mampu. Di balik alasan pragmatis tersebut, kalangan ini dan sejumlah pemerhati pendidikan juga merisaukan adanya kecenderungan liberalisasi pendidikan di Indonesia. Bahkan ada pemerhati pendidikan sampai berhasil menerbitkan tulisan protesnya dalam bentuk buku yang berjudul antara lain *“Tirani Kapital dalam Pendidikan”* (ditulis oleh Darmaningtyas, Edi Subkhan, dan I. Fahmi Panimbang), dan buku *“Pendidikan Rusak-Rusakan (oleh Darmaningtyas)”*.

KONSEP DASAR

Liberalisasi pertama kali dikenal luas penerapannya dalam bidang ekonomi, yang dikemukakan pertama kali oleh *Alexander Rustow* dan *Walter Eucken* pada awal 1930-an. Liberalisme menganjurkan penyelenggaraan ekonomi pasar bebas dan negara berfungsi untuk memfasilitasi pasar bebas tersebut dengan membuat undang-undang atau peraturan. *Gagasan Rustow* dan *Walter Eucken* tersebut dikembangkan oleh *Wilhelm Ropke* dan *Henry C Simon*. *Freiburger* membuat paket kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai paket kebijakan *Ordoliberalisme*.

Kebijakan ini sesungguhnya kebijakan ekonomi liberal model baru (*neoliberal*). Garis kebijakan ini menyangkut (1) memberikan kebebasan

kepada individu untuk bersaing secara bebas-semburna di pasar, (2) mengakui kepemilikan pribadi terhadap berbagai faktor produksi, (3) membentuk harga pasar dengan melakukan penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang. Namun kemudian, pada akhir 1970-an, terjadi depresi besar, yang menyebabkan ekonomi neoliberal tersisih dengan munculnya ekonomi negara kesejahteraan yang dikemukakan oleh *Maynard Keynes*. Konsep negara kesejahteraan menghendaki bahwa peranan negara dalam bidang ekonomi tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal, khususnya untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja.

Pada era kepemimpinan *Ronald Reagan* sebagai Presiden Amerika Serikat dan *Margareth Thatcher* sebagai Perdana Menteri Inggris pada awal 1980-an, gagasan ekonomi neoliberal disempurnakan oleh *Milton Friedman* dan disebarluaskan ke seluruh dunia, khususnya ketika terjadi krisis ekonomi di Amerika Latin pada penghujung tahun 1980-an. Untuk mengatasi krisis tersebut Amerika Latin bekerjasama dengan Departemen Keuangan Amerika Serikat dan IMF meluncurkan kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai kebijakan Konsensus Washington. Kebijakan Konsensus Washington meliputi empat hal, yaitu (1) pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi negara dalam berbagai bentuknya, (2) pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan, (3) pelaksanaan liberalisasi sektor perdagangan dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN. Dampaknya liberalisasi ekonomi pada negara miskin seperti Indonesia terletak pada melemahnya kemampuan sebuah ketergantungan perekonomian negara-negara miskin tersebut terhadap pemenuhan kepentingan para pemodal internasional yang berasal dari negara-negara kaya tertentu.

Kalau demikian halnya, apa sesungguhnya liberalisasi? Secara harfiah liberalisasi berasal dari kata Latin “liberalis”, yang diturunkan dari kata “liber”, yang berarti bebas, merdeka, tidak terikat, dan tidak tergantung. Secara umum, pandangan liberal ini menjunjung tinggi martabat pribadi manusia dan kemerdekaannya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik (*Mangunhardjana*, 1997:148). Dengan demikian, liberalisasi adalah memberikan kebebasan atau keleluasaan dalam melakukan suatu tindakan. Sampai di sini, sesungguhnya liberalisasi tidak bermasalah.

Liberalisasi menjadi bermasalah, karena perkembangan paham liberal menjadi tidak terkendali, ketika para penganutnya menjadi sangat optimistis bahwa manusia dapat mengontrol dirinya sendiri tanpa

intervensi dari luar. Aturan-aturan yang ada dan harus ada bukan untuk membatasi ruang gerak seseorang, tetapi untuk menjamin dan memberikan perlindungan terhadap gerak dan perilaku bebasnya. Dalam bidang politik (kehidupan demokrasi), seseorang memiliki kebebasan yang luas untuk memilih dan dipilih, berpendapat, berserikat dan berorganisasi. Di bidang ekonomi seseorang bebas memperkaya diri dengan kerja kerasnya dan bebas berusaha apa saja sepanjang pasar menghendakinya.

Di bidang pendidikan, istilah liberalisasi hangat diperbincangkan ketika pemerintah memberikan banyak kebebasan, sehingga terkesan “lepas tangan” atau lebih tepat melepaskan tanggungjawab menyelenggarakan pendidikan, seperti diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31. Hal ini ditandai ketika swasta yang masuk dalam penyelenggaraan pendidikan mulai menggandeng pemilik modal besar (konglomerat) untuk mendirikan sekolah-sekolah atau perguruan tinggi bagi kalangan elite. Pada saat yang sama, perguruan swasta juga mulai bermitra dengan sekolah atau perguruan tinggi asing mendirikan lembaga yang sama di dalam negeri, dengan berbagai model, seperti penggunaan tenaga guru atau dosen dari luar negeri, alih kredit, dan adopsi kurikulum. Fenomena ini kemudian diikuti oleh sejumlah perguruan tinggi negeri, yang mengadopsi pola yang dipakai oleh perguruan swasta.

Melihat perkembangan dinamika masyarakat yang secara diam-diam menerima “paham liberal dalam banyak sektor kehidupan” pemerintah mengintrodusir istilah sejenis dengan nama “otonomi pendidikan”, terutama sejalan dengan pemberian otonomi di bidang pemerintahan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sejak adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, sebagai konsekuensi dari adanya Amandemen UUD 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 50 ayat 6) menyebutkan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi² dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Lebih lanjut disebutkan dalam Undang-Undang yang sama (pasal 51 ayat 1-2) bahwa: (a) pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen

---

² Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

berbasis sekolah/madrasah³, dan (b) pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Sementara itu, pengelolaan satuan pendidikan non-formal dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat (UU No. 20 Th. 2003, pasal 52 ayat 1).

Berdasarkan berbagai aturan di atas, sesungguhnya tidak ekpslisit dapat dikatakan bahwa pendidikan nasional sekarang ini menganut liberalisasi. Namun dengan pemberian otonomi dikhawatirkan bahwa pendidikan dapat terserat pada liberalisasi pendidikan. Di sinilah sesungguhnya terjadi pertarungan kepentingan, dalam arti apakah pemerintah akan membendung liberalisasi yang sudah terlanjur masuk bersama masuknya liberalisasi dalam bidang politik, ekonomi, serta sosial-budaya atautkah pemerintah mengakomodasi liberalisasi tersebut? Dalam hal ini, pelaku pendidikan dan masyarakat terpolarisasi antara menerima dan menolak liberalisasi pendidikan ini neskipun dengan kadar yang bervariasi.

Jika melihat fakta, pemerintah memang terlihat mengakomodasi liberalisasi pendidikan, antara lain dengan kasat mata tercermin dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007, yang mengkategorikan pendidikan sebagai bidang usaha, seperti yang dipahami dalam bidang ekonomi (lihat tabel 1). Dalam peraturan Presiden ini sangat jelas pula bahwa sektor pendidikan dimungkinkan menjadi lahan investasi modal asing sampai maksimal 49 persen. Banyak kalangan mencemaskan, bahwa jika kemitraan dengan “pemilik modal” dalam negeri tidak berimbang, maka terbuka peluang kepemilikan mayoritas beralih ke tangan asing, dengan segala konsekuensinya. Di lain pihak, masyarakat pun banyak pula yang menerima, terutama dari kalangan menengah ke atas.

---

³ Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah (MBS/M) adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan.

Tabel 1
Kutipan Daftar Bidang Usaha yang Tebruka dengan Persyaratan
Kepemilikan Modal pada Sektor Pendidikan Nasional

No	Bidang Usaha	KBLI	Batasan Kepemilikan Modal Asing
72	Pendidikan Dasar dan Menengah	80121 80122 80123 80221 80222	Maksimum 49%
73	Pendidikan Tinggi	80321 80322	Maksimum 49%
74	Pendidikan Non-Formal	80921 80922 80923 80929	Maksimum 49%

Sumber: Lampiran II PERPRES No. 77 Tahun 2007 (berlaku 3 tahun atau s.d.dikeluarkan peraturan penggantinya)

KBLI = Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

EKONOMI GLOBAL DAN PASAR BEBAS

Liberaliasi pendidikan adalah konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam WTO (*World Trade Organization*), yaitu sejak tahun 1994. Rakyat (melalui wakilnya di DPR) secara implisit berarti juga sudah setuju untuk bergabung dengan WTO, tepatnya sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan (ratifikasi) “*Agreement Establising the World Trade Organization*”. Sebagai anggota WTO, berarti Indonesia tentu saja tidak dapat menghindar dari berbagai perjanjian liberalisasi perdagangan, termasuk perdagangan jasa pendidikan. Apalagi, sejak negara-negara anggota WTO pada bulan Mei 2005 menandatangani *General Agreement on Trade in Services (GATS)* yang mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa, antara lain layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, pendidikan tinggi dan pendidikan selama hayat, serta jasa-jasa lainnya.

Seperti dikatakan oleh Effendi (2005), dalam tipologi yang sering digunakan oleh para ekonom, bahwa kegiatan usaha dalam masyarakat dibagi ke dalam 3 (tiga) sektor. Sektor primer meliputi semua industri ekstraksi hasil pertambangan dan pertanian. Sektor sekunder mencakup industri pengolahan bahan dasar menjadi barang, bangunan, produk manufaktur dan *utilities*. Sektor tersier adalah industri yang mengubah wujud benda fisik (*physical services*), keadaan manusia (*human services*)

dan benda simbolik (*information and communication services*). Sejalan dengan pandangan ilmu ekonomi ini, WTO beranggapan bahwa pendidikan merupakan salah satu industri sektor tersier, karena kegiatan utamanya adalah mentransformasi orang yang tidak atau minim pengetahuan dan ketrampilannya menjadi orang yang bertambah pengetahuan dan ketrampilannya.

Hingga tahun 2005 yang lalu saja sudah ada 6 negara yang meminta agar Indonesia membuka peluang investasi pada sektor jasa pendidikan, yakni Australia, Amerika Serikat, Jepang, Cina, Korea dan Selandia Baru. Sub-sektor jasa yang ingin dimasuki adalah pendidikan tinggi, pendidikan seumur hayat, serta pendidikan vokasional dan profesi. Cina bahkan minta agar Indonesia membuka pintu untuk pendidikan kedokteran Cina. Jelas sekali disini bahwa permintaan tersebut bukanlah didasari oleh motif kemanusiaan melainkan karena mengharapkan profit dan tujuan-tujuan ekonomi umumnya (Effendy, 2005).

Dengan demikian dikhawatirkan bahwa liberalisasi pendidikan akan mengalami nasib yang sama dengan liberalisasi ekonomi, dalam arti bahwa tetap saja yang lebih beruntung adalah pemilik modal (penyelenggara pendidikan) asing. Sementara itu, WTO membungkusnya dengan dalih bahwa perguruan tinggi asing dapat memacu peningkatan mutu pendidikan Indonesia, termasuk dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, memperbaiki efisiensi pengelolaan pendidikan, serta mengurangi aliran uang ke luar negeri. Sejumlah pihak mengkhawatirkan bahwa yang dimaksud mutu adalah yang berkualitas dan berkepribadian sebagai seorang penganut liberalisme, yang jelas-jelas lebih memihak kepada pemilik modal, bukan memihak kepada rakyat.

Persoalannya, mungkin bukan sebagian kalangan masyarakat semata-mata tidak setuju dengan keikutsertaan Indonesia dalam WTO, tetapi momentumnya belum tepat. Hal ini dikarenakan kondisi pendidikan nasional sampai saat ini yang masih memprihatinkan. Misalnya, penyandang buta aksara dan putus sekolah masih tinggi dibandingkan sejumlah negara tetangga. Dalam kondisi yang demikian, sejalan dengan logika ekonomik WTO, pendidikan hanya akan menjadi barang komersial yang semakin sulit terjangkau oleh kebanyakan masyarakat Indonesia.

MODEL-MODEL LIBERALISASI PENDIDIKAN

Dalam penyediaan jasa pendidikan, WTO telah mengidentifikasi 4 model yang dapat diimplementasikan, yaitu: (a) *Cross-border supply*, yaitu institusi pendidikan tinggi luar negeri menawarkan kuliah-kuliah melalui jaringan internet dan *on-line degree* program, atau Model-1; (b)

Consumption abroad, adalah bentuk penyediaan jasa pendidikan tinggi, yang sampai sekarang paling dominan, yaitu mahasiswa belajar di perguruan tinggi luar negeri atau Model-2; (c) *Commercial presence*, atau kehadiran perguruan tinggi luar negeri dengan membentuk *partnership*, *subsidiary*, atau *twinning arrangement* dengan perguruan tinggi lokal, atau Model-3, dan (d) *Presence of natural persons*, dosen, guru atau pengajar asing mengajar di lembaga-lembaga pendidikan lokal, atau Model-4.

Model-1 di atas pada dasarnya sangat sulit dikontrol oleh pemerintah, karena berlangsung di dunia maya. Sepanjang peserta didiknya tidak memerlukan pengakuan formal dari pemerintah, seperti verifikasi ijazah setelah menamatkan pendidikan, program ini positif untuk meningkatkan pengetahuan dan mungkin juga ketrampilan dari peserta didiknya. Program ini juga dalam jangka pendek belum akan terlalu serius dampak negatifnya, karena masih terbatas untuk kota-kota besar atau sebatas di ibukota provinsi, mengingat kemudahan mengakses internet di banyak tempat di Indonesia masih relatif terbatas.

Model-2 juga belum akan mencemaskan dalam jangka pendek, karena belajar di perguruan tinggi di luar negeri masih relatif mahal, sehingga hanya kalangan terbatas saja yang akan bersekolah ke sana. Di pihak lain, di dalam negeri sendiri tersedia banyak pilihan untuk melanjutkan studi bagi para lulusan Sekolah Menengah. Model-2, sama seperti Model-1 tidak perlu terlalu dicemaskan oleh banyak kalangan.

Model-3 yang mungkin akan menimbulkan kerawanan, karena perguruan tinggi asing masuk ke dalam negeri. Diyakini bahwa biaya kuliah tidak akan semahal jika mahasiswa harus ke negara asal perguruan tinggi yang bersangkutan. Dengan demikian, bukan hanya kalangan elit yang akan masuk ke sana, tetapi juga dari kalangan menengah, yang sebelumnya merupakan input untuk perguruan tinggi lokal (dalam negeri). Dalam istilah “ekonomi”, perguruan tinggi lokal akan kehilangan pangsa pasar potensialnya, karena mungkin dari sisi sumberdaya yang dimiliki masih kalah dibandingkan dengan perguruan tinggi asing tersebut. Dalam konteks ini, banyak perguruan tinggi lokal yang mencemaskan eksistensinya, karena merasa belum siap bersaing dengan mekanisme pasar bebas yang dikehendaki oleh *WTO/GATS*. Di samping itu, yang mencemaskan juga adalah masuknya nilai-nilai baru yang mungkin tidak selalu selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang sudah dijunjung tinggi sejak lama.

Model-4, seperti halnya Model-3 juga diprediksi akan banyak menimbulkan kerawanan, karena masuknya tenaga pengajar asing akan menjadi saingan berat bagi tenaga pengajar lokal, apalagi kalau tenaga

asing tersebut siap dibayar tidak terlalu mahal diandingkan tenaga pengajar lokal, katakanlah dari sesama negara berkembang, seperti India, Filipina, Cina, atau Thailand. Mungkin dari sisi penguasaan konten keilmuan, pengajar asing tidak berbeda signifikan dibandingkan dengan tenaga pengajar lokal, tetapi dari aspek kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris akan menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi penyelenggara pendidikan lokal di tengah persaingan global yang semakin ketat. Seperti halnya, Model-3, Model-4 dikhawatirkan juga akan diikuti dengan masuknya nilai-nilai baru yang dibawa para tenaga pengajar, yang mungkin akan merubah tatananan nilai luhur bangsa Indonesia.

POLEMIK SEPUTAR LIBERALISASI PENDIDIKAN: KASUS BHP

Jika memperhatikan perdebatan atau polemik tentang liberalisasi pendidikan, terutama dikaitkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dapat dikelompokkan menjadi Pro-Liberalisasi dan Kontra-Liberalisasi. Penjelasanannya daPat dipaparkan secara singkat sebagai berikut.

Pertama, Kaum Pro-Liberalisasi beranggapan bahwa Indonesia dan masyarakatnya suka atau tidak suka tidak dapat menghindarkan diri dari gelombang globalisasi, yang membawa serta isu liberalisasi di dalamnya, termasuk di bidang pendidikan. Kelompok ini juga berpendapat bahwa liberalisasi pendidikan, terutama dalam bentuk memberikan peran yang lebih luas kepada pihak asing dapat menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan, sekaligus perluasan akses dan pemerataan pendidikan (yang belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh pengelola pendidikan lokal).

Kaum ini juga berpendapat bahwa liberalisasi pendidikan tidak identik dengan komersialisasi pendidikan, karena masuknya pendidikan asing ke Indonesia akan terproteksi dengan peraturan perundangan yang harus dipatuhi oleh pihak asing. Dalam seminar di hadapan petinggi ABP-PTSI (2009), sejumlah argumen misalnya dikemukakan oleh Menteri Pendidikan Nasional (*Sudibyo*, 2009), bahwa UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang BHP telah mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Anggaran dasar BHP Negeri dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Kepala Daerah, dan Akte Notaris Anggaran dasar BHP-Swasta harus disetujui oleh Menteri Pendidikan Nasional.
- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin bahwa wajib belajar pendidikan dasar (SD/MI s.d. SMP/MTs) gratis untuk BHP Negeri, serta menanggung biaya operasional wajib belajar pendidikan dasar bagi BHP-Swasta.

- c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin seluruh biaya investasi dan minimal $\frac{1}{3}$ biaya operasional pendidikan menengah pada BHP-Negeri, serta minimal $\frac{1}{2}$ biaya operasional pendidikan tinggi bagi BHP-Negeri.
- d. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik miskin yang berprestasi.
- e. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan pendanaan kepada satuan pendidikan swasta yang sudah BHP.
- f. BHP harus berprinsip nirlaba, dan Sisa Hasil usaha (SHU) harus ditanamkan kembali untuk kepentingan pendidikan yang dikelolanya.
- g. Pengelola dan atau penyelenggara pendidikan yang memperkaya diri diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara serta denda sebesar Rp 500 juta (*lima ratus juta rupiah*).

Dengan beberapa argumentasi di atas, maka meskipun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang BHP tidak mengatur perguruan asing yang akan beroperasi di Indonesia, tetapi semangat undang-undang ini adalah memproteksi perguruan lokal dari serbuan perguruan asing. Secara logika, undang-undang atau peraturan tentang perguruan asing tidak akan diloloskan jika bertentangan dengan undang-undang yang telah ada sebelumnya.

Kedua, Kelompok Kontra-Liberalisasi, beranggapan bahwa nilai-nilai luhur pendidikan akan menjadi sirna dan akses masyarakat kalangan bawah untuk menikmati pendidikan berkualitas menjadi terhambat, karena pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak asing dan penyelenggara pendidikan yang berorientasi liberal yang cenderung menetapkan biaya pendidikan yang mahal. Di pihak lain, pemerintah seakan melegalkan pelepasan tanggungjawabnya untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu, yang diamanatkan secara implisit dan eksplisit oleh konstitusi.

Sularto (dalam *Handoko*, 2009) misalnya jelas menyatakan menolak BHP, dengan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, karena UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang BHP menyuburkan privatisasi dan liberalisasi pendidikan, yang terlihat dari fenomena sebagai berikut:

- a. Mengarahkan pendidikan sebagai korporasi pendidikan
- b. Tidak adanya kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar dan menengah
- c. Tidak adanya penegasan tentang dana pendidikan (*sebesar 20 persen*)
- d. Dana pendidikan dari pemerintah hanya berupa hibah
- e. Pendidikan berbasis masyarakat

- f. Pemerintah lepas dari perannya sebagai operator pendidikan
- g. Penyeragaman aturan dalam setiap jenjang pendidikan
- h. Campur tangan pemerintah akan membatasi peran penyelenggara pendidikan yang sekarang, seperti yayasan, dengan adanya Majelis Wali Amanat (WMA).

Darmaningtiyas, et.al. (2009) juga menolak UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang BHP sejak masih berbentuk RUU, karena terdapat sejumlah klausul yang kontroversial di dalamnya. Alasannya sebagai berikut:

- a. Cakupan BHP sudah sangat melebar dari apa yang dikehendaki dalam Pasal 53 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam istilah hukum dikatakan bahwa *lex generalis* dikalahkan oleh *lex specialis*.
- b. melanggar hak sejarah (*historische recht*) yayasan, karena BHP secara perlahan-lahan akan menghilangkan eksistensi yayasan, yang sesungguhnya dilindungi hukum oleh UU Nomor 28 Tahun 2004 juncto UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- c. Pelepasan tanggungjawab negara, terutama jika melihat pengalaman beberapa Perguruan Tinggi BHMN, seperti UI, UGM, IPB, ITB, UNAIR, USU, dan UPI, yang semakin mahal dan semakin sulit terjangkau oleh kalangan miskin, yang seharusnya mendapatkan perhatian pemerintah.
- d. Memperkuat BHMN, dalam arti bahwa Perguruan Tinggi BHMN yang sudah eksis sebelumnya diberikan payung hukum yang lebih kuat serta memperluas pemberlakuan BHMN bagi Perguruan Tinggi (Negeri) yang belum BHMN, sehingga dikhawatirkan PT-BHMN “susulan” akan semakin menambah sulitnya kalangan miskin mengakses PTN, tidak hanya di beberapa PT-BHMN tetapi di seluruh PTN yang akan berubah menjadi PT-BHMN.
- e. Mengaburkan visi pendidikan: *bisnis atau sosial*, karena pengelolaan pendidikan (tinggi) didesain mirip dengan mengelola suatu perusahaan dan atau terbukanya lembaga pendidikan mengelola usaha-usaha bisnis untuk mendukung aktivitas pendidikannya, sehingga mengaburkan keberadaan suatu lembaga pendidikan, antara menjalankan visi bisnis atau aktivitas sosial.
- f. Upaya masuknya Modal Asing. Fenomena ini memang tidak eksplisit mengatur modal asing dalam UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang BHP tetapi dapat dijadikan payung hukum untuk Peraturan Presiden Nomor 76 dan 77 Tahun 2007, seperti telah disebutkan di bagian terdahulu, yang memungkinkan masuknya modal asing sampai maksimal sebesar 49 persen.

- g. Hilangnya “sekolah” dan Ketidakjelasan Nasib “Guru”. Dalam BHP memang terkesan adanya penghapusan istilah “sekolah”, yang selama ini sudah sangat mengakar, berubah menjadi BHP. Guru yang selama ini, terutama di sekolah negeri berstatus PNS, secara perlahan akan berganti status sebagai pegawai BHP, bahkan sebatas pegawai kontrak.
- h. Tatakelola yang Mempertajam Konflik. Hal ini dimungkinkan karena terjadi perubahan tatakelola yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Jika sebelumnya, di sejumlah perguruan terjadi permasalahan sesungguhnya tidak dapat dijadikan alasan untuk menggeneralisasikan ke perguruan lain supaya merubah tatakelolanya yang sudah terbukti berjalan dengan baik,
- i. Korporatisasi Pendidikan. Hal ini terlihat jelas dari istilah dan semangat penyusun UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang BHP, sehingga mirip rancangan suatu perusahaan, terutama perusahaan swasta, sehingga akan mengubah watak pendidikan nasional dari aktivitas sosial-kemanusiaan menjadi bisnis-kapitalistik.
- j. Merusak Tatanan Pendidikan. Kekhawatiran ini muncul karena kesejajaran swasta dan negeri dalam mengelola pendidikan yang sering didengungkan menjadi hilang, istilah perguruan tinggi negeri dan swasta akan berubah menjadi PT-BHPP, PT-BHPPD, dan PT-BHPM, serta ketidakjelasan tanggungjawab pemerintah dalam pendanaan pendidikan, terutama di perguruan tinggi.

Jika mencermati pro-kontra dalam uraian di atas, sesungguhnya liberalisasi pendidikan positif, karena memberikan keleluasaan kepada pengelola dan penyelenggara pendidikan untuk mengoptimalkan perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian, ketika aturan tentang liberalisasi menjadi “sangat liberal” dan lepas orientasinya dengan filosofi dan kondisi sosiologis masyarakat maka liberalisasi akan menjebak pendidikan menjadi instrumen ekonomi (bisnis). Dalam kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya siap menghadapi “globalisasi ekonomi”, maka pemberlakuan aturan yang sangat liberal tadi akan dikhawatirkan menutup akses pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan tinggi.

STRATEGI DI KANCAH PERGULATAN DUNIA

Dengan memperhatikan tantangan global dan pergaulan bangsa yang semakin mendunia serta kondisi internal bangsa, yang belum sepenuhnya siap bersaing dengan banyak negara maju, terutama yang berperan di lembaga-lembaga dunia, seperti PBB, IMF, WTO/GATS, maka diperlukan beberapa strategi dan kebijakan yang mungkin ditempuh.

Pertama, sebagai bangsa yang tidak mungkin mengisolasi diri dari dunia internasional (*sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945*), maka isu globalisasi yang membawa masuk sekaligus isu liberalisasi di bidang pendidikan harus diterima secara lapang dada, tetapi dengan membuat aturan berdasarkan landasan filosofi bangsa dan memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia.

Kedua, ranah pendidikan yang dikategorikan sebagai sektor jasa, seperti halnya sektor jasa lainnya dan menjadi acuan utama untuk mengklasifikasikan bidang usaha/pekerjaan dalam ilmu ekonomi sudah diterima luas di mana-mana. Dengan demikian maka konsekuensinya berarti bahwa pendidikan tidak mungkin melepaskan aspek “bisnis” dalam menyelenggarakan pendidikan, meskipun tetap harus mengutamakan aspek “sosial” ketimbang aspek bisnisnya. Bahkan di kalangan pendidikan sendiri sering muncul pernyataan bahwa pendidikan bermutu sulit lepas dari konotasi pendidikan mahal. Persoalannya, mungkinkah pemerintah yang harus menanggung biaya mahal tersebut lebih besar dari yang harus ditanggung oleh masyarakat, sehingga pendidikan bermutu menjadi murah bagi rakyat.

Ketiga, berkaitan dengan *butir kedua* di atas, maka pemerintah wajib memperkuat ketahanan mental bangsa dalam berhadapan dengan isu globalisasi, sehingga masyarakat Indonesia tidak tercerabut dari akar budayanya, tetapi sekaligus mampu berkiprah dan berperan aktif di dunia internasional.

Keempat, dalam kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya siap, maka pemberlakuan berbagai aturan hendaklah selalu dilakukan secara gradual dan selektif; *bukan hanya pada peraturan tertentu saja*. Misalnya pemberlakuan dibatasi sampai di kota-kota besar, untuk jenjang pendidikan tertentu (perguruan tinggi), dan bidang ilmu tertentu (program studi yang belum diselenggarakan oleh perguruan tinggi lokal).

PENUTUP

Liberalisasi sesungguhnya diperlukan untuk memberikan keleluasaan kepada *stakeholders* dalam menyelenggarakan pendidikan, misalnya melalui pemberian kesempatan kepada swasta ikut menyelenggarakan pendidikan, pemberlakuan otonomi pendidikan tinggi, serta Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Namun demikian perundangan yang mengatur liberalisasi ini harus mampu mengakomodasi keberlangsungan nilai-nilai luhur bangsa, dilakukan secara gradual sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat, dan memberikan batasan yang tegas agar masuknya pemodal asing (penyelenggara pendidikan luar

negeri) tidak mematikan penyelenggara pendidikan lokal. Hal ini dikarenakan titik krusial penolakan sejumlah kalangan terhadap liberalisasi pendidikan adalah pada konteks terbukanya peluang asing mendikte sistem pendidikan nasional dan berubahnya lembaga pendidikan yang bernuansa sosial menjadi ajang bisnis.

Dalam kaitan dengan BHP yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 yang masih kontroversial perlu untuk dikaji kembali, terutama dalam rangka mendudukkan liberalisasi secara proporsional. Di samping itu perlu pula direview sejumlah peraturan perundangan lainnya yang terkait, karena UU Nomor 9 Tahun 2009 tidak lahir dan muncul secara terpisah dari yang lainnya. Selanjutnya, yang juga penting dikawal adalah diterbitkannya sejumlah peraturan pelaksanaan sebagai perintah dari UU Nomor 9 Tahun 2009, agar semangatnya tetap sejalan dengan keinginan membangun sistem pendidikan nasional yang mengakar pada kultur sendiri tetapi terbuka terhadap masuknya globalisasi yang konstruktif.

REFERENSI

- Darmaningtyas, E. Subkhan, dan .F. Panimbang. 2009. *Tirani Kapital dalam Pendidikan: Menolak UU BHP*. Jakarta: Darmar Press dan Pustaka Yashiba.
- Effendy, S. *Strategi Menghadapi Liberalisasi Pendidikan Tinggi*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Pendidikan Tinggi di Era Pasar Bebas: Tantangan, Peluang dan Harapan”, diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, 2 Mei 2005
- Handoko, S. 2009. *Bahan Diskusi Terbatas tentang BHP*. (bahan tidak diterbitkan)
- Mangunhardjana, A. (1997). *Isme-isme dari A Sampai Z*. Yogyakarta: Kanisius.
- Setiawan, D. *Liberalisasi Pendidikan dan WTO*. [www. Oc.its.ac](http://www.Oc.its.ac).
- Sudibyo, B. (2009). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang BHP. Paparan Mendiknas dalam *Seminar Runtuhnya Peguruan Swasta di Era Liberakisasi Pendidikan, di Jakarta tanggal 16-2-2009*.
- , (2009). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

- . (2007). Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
- . ------. (2007). Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- . 2004. *UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.*